



Desvian Bandarsyah

Dinamika dan Kemajuan

FKIP Uhamka dalam
Perspektif Sejarah 1957-2020

Desvian Bandarsyah

FKIP Uhamka dalam Perspektif Sejarah 1957-2020



Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (FKIP Uhamka) menjadi cermin dari cita-cita luhur Muhammadiyah dalam membangun peradaban ilmu.

Gagasan pendirian Universitas Muhammadiyah sebenarnya sudah diamanahkan dan diputuskan dengan bulat pada Muktamar Muhammadiyah yang ke 25 tahun 1935 di Batavia (Jakarta) hingga lahirnya IKIP Muhammadiyah Jakarta pada 1957, perjalanan panjang ini merekam dinamika, idealisme, dan keteguhan para pendirinya.

Buku ini menelusuri langkah-langkah bersejarah itu: bagaimana gagasan pendidikan Islam modern tumbuh, menghadapi tantangan kolonial, perang kemerdekaan Republik Indonesia, dan perubahan sosial, hingga menjelma menjadi lembaga pendidikan unggulan yang melahirkan insan cendikia dan pendidik bangsa.



CV. Semesta Irfani Mandiri
Pancoran Mas, Kota Depok
Email: bukuirfani@gmail.com
Web: www.penerbitirfani.com
HP: 0877 8927 2795

Dinamika dan Kemajuan

FKIP Uhamka dalam Perspektif Sejarah, 1957-2020

Desvian Bandarsyah

CV. Semesta Irfani Mandiri

Dinamika dan Kemajuan

Penulis:

Desvian Bandarsyah

Editor:

Sulaeman

Penata Letak:

Burhan Ramadhani

Desain Sampul:

Ahmad Soleh

Cetakan I, Januari 2025 | Ukuran: 14x20 cm

Tebal: x + 178 halaman | ISBN: -

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: bukuirfani@gmail.com

Website: www.penerbitirfani.com

Instagram & Twitter: [@penerbitirfani](https://www.instagram.com/penerbitirfani)

WhatsApp: 087789272795

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Sejarah tidak pernah berhenti di masa lalu. Ia senantiasa hidup dalam ingatan, gagasan, dan tindakan manusia yang berupaya memberi makna pada perubahan. Di dalam arus waktu yang terus mengalir, setiap lembaga pendidikan lahir, tumbuh, dan bertransformasi sebagai wujud dari pergulatan manusia dengan cita-cita dan realitas. Sejarah adalah tentang waktu yang berpikir dan pendidikan menjadi salah satu cara terbaik bagi manusia untuk berpikir bersama waktu itu.

Menulis sejarah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah menulis tentang pergulatan manusia dengan waktu, tentang bagaimana gagasan, nilai, dan cita-cita termanifestasikan dalam ruang sosial yang senantiasa berubah. Buku *Dinamika dan Kemajuan: FKIP Uhamka dalam Perspektif Sejarah 1957–2020* ini lahir dari kesadaran historis untuk merekam perjalanan panjang sebuah institusi yang bukan hanya berperan sebagai wadah akademik yang tidak sekadar mengajarkan ilmu, menanamkan nilai, komitmen, dan semangat perubahan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antara intelektualitas, keislaman, dan kemanusiaan.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (FKIP Uhamka) berdiri di persimpangan sejarah: antara idealisme gerakan pembaruan Muhammadiyah dengan realitas praksis pendidikan nasional yang terus mengalami transformasi. Sejak awal

kelahirannya pada 1957, FKIP Uhamka telah menapaki jalan panjang modernisasi pendidikan dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pencerahan dan dakwah kemanusiaan. Di tengah arus perubahan politik, sosial, dan budaya yang silih berganti, fakultas ini menunjukkan daya tahannya yang luar biasa tidak hanya dengan bertahan, tetapi dengan terus mengartikulasikan kembali makna “pendidikan” sebagai proyek peradaban.

Dalam membaca perjalanan sejarah FKIP Uhamka, kita sesungguhnya sedang menyimak narasi panjang tentang pembentukan agensi intelektual Muhammadiyah di dunia pendidikan tinggi. Perubahan kurikulum, dinamika kepemimpinan, pergulatan dengan paradigma pedagogis modern, hingga pencarian format ideal antara profesionalisme dan keislaman, semuanya merupakan bagian dari dialektika antara struktur dan agensi yang membentuk wajah lembaga ini. Dengan menelusuri fragmen-fragmen sejarah itu, kita belajar bahwa kemajuan bukanlah garis lurus, melainkan proses historis yang penuh negosiasi, konsensus, dan refleksi kolektif.

Lebih jauh, buku ini mencoba menafsirkan kembali perjalanan FKIP Uhamka bukan hanya sebagai rentetan fakta, tetapi sebagai cermin tentang bagaimana gagasan pendidikan Islam progresif menemukan bentuk dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan modern. Ia menegaskan bahwa sejarah lembaga ini adalah sejarah tentang ketekunan dan daya tahan: tentang sekelompok intelektual dan pendidik yang percaya bahwa ilmu harus berpihak pada kemaslahatan manusia dan peradaban.

Semoga buku ini tidak hanya memperkaya khazanah pengetahuan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia,

tetapi juga menginspirasi refleksi baru tentang makna kemajuan dalam dunia akademik. Sebab pada akhirnya, setiap lembaga pendidikan yang bertahan dan terus tumbuh adalah saksi hidup dari dialog abadi antara nilai, pengetahuan, dan waktu.

Jakarta, Desember 2024

Penulis

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad 20, lanskap pendidikan di Indonesia ditandai oleh dualisme yang mencolok: pendidikan Islam tradisional yang diwakili oleh pesantren dan madrasah, serta pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua sistem ini memiliki karakteristik, tujuan, dan dampak yang sangat berbeda terhadap masyarakat pribumi. Pemahaman mendalam tentang kondisi ini sangat penting untuk mengapresiasi signifikansi gerakan pembaharuan pendidikan yang kemudian digagas oleh Muhammadiyah. Kondisi ini menciptakan ketegangan dan kebutuhan akan sebuah sintesis yang mampu menjawab tantangan modernitas tanpa mengorbankan identitas keislaman, sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat dan kompleks.

Pendidikan Islam tradisional, terutama pesantren, telah menjadi tulang punggung penyebaran dan pemeliharaan ajaran Islam di Nusantara selama berabad-abad. Pesantren, dengan sistem pengajaran bandongan dan sorogan, berfokus pada studi kitab kuning (kitab-kitab klasik berbahasa Arab) yang mencakup ilmu fikih, tauhid, tasawuf, nahwu, sharaf, dan tafsir. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mendalami ilmu agama dan mampu membimbing umat. Madrasah, meskipun lebih terstruktur dengan kelas dan

kurikulum, masih sangat didominasi oleh materi agama dan metode hafalan. Lembaga-lembaga ini, meskipun memiliki akar yang kuat dalam masyarakat, mulai menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat, terutama dalam menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan modern dan tantangan kolonialisme.

Pesantren memiliki karakteristik unik sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Sistem pondok atau asrama menjadi ciri khas, di mana santri tinggal bersama Kiyai dan mendapatkan pendidikan secara langsung, menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat. Kurikulumnya tidak formal dan sangat bergantung pada Kiyai, dengan fokus pada penguasaan kitab kuning sebagai sumber utama ilmu agama. Metode pengajaran bandongan (Kiyai membaca dan menerangkan, santri menyimak dan mencatat) dan sorogan (santri membaca di hadapan Kiyai untuk dikoreksi) adalah metode utama yang menekankan hafalan dan pemahaman teks klasik. Madrasah, di sisi lain, mulai mengadopsi sistem kelas dan jenjang, namun materi yang diajarkan masih sangat dominan agama, dengan sedikit sentuhan ilmu umum yang porsinya sangat terbatas. Kehidupan di pesantren juga membentuk karakter santri melalui disiplin, kemandirian, dan ketaatan kepada kiyai, yang menjadi fondasi moral dan spiritual mereka.

Sementara itu, kurikulum pesantren tradisional sangat berorientasi pada ilmu-ilmu agama klasik. Kitab-kitab yang diajarkan meliputi berbagai disiplin ilmu Islam, seperti *Fathul Qarib* atau *Minhajut Thalibin* untuk fikih, *Jauharatut Tauhid* untuk tauhid, *Ihya Ulumiddin* untuk tasawuf, serta

Alfiah Ibnu Malik untuk nahwu dan sharaf. Penguasaan bahasa Arab menjadi prasyarat utama untuk memahami kitab-kitab ini secara mendalam. Selain itu, studi Al-Qur'an dan Hadis juga menjadi inti dari kurikulum,seringkali melalui metode hafalan dan penafsiran tradisional. Sementara itu, madrasah tradisional juga mengajarkan materi serupa, namun dengan penambahan sedikit mata pelajaran umum seperti berhitung atau membaca huruf Latin, meskipun porsi nya sangat kecil dan seringkali tidak terintegrasi. Kurikulum ini, meskipun mendalam dalam ilmu agama, seringkali kurang memberikan bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan dunia modern yang semakin kompleks, seperti ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan ekonomi, yang mulai berkembang pesat di dunia Barat. Keterbatasan ini kemudian menjadi celah yang diisi oleh gerakan pembaharuan pendidikan Islam, termasuk Muhammadiyah, yang menyadari pentingnya integrasi ilmu umum dan agama.

Metode pengajaran di pesantren sangat menekankan pada transmisi ilmu secara langsung dari kiyai kepada santri, serta pembentukan karakter melalui keteladanan dan disiplin. Selain bandongan dan sorogan, ada juga metode *halaqah* (diskusi kelompok) dan *mujawwalah* (praktik mengajar antar santri) yang mendorong interaksi dan pemahaman mendalam terhadap materi. Pembentukan karakter santri dilakukan melalui kehidupan sehari-hari di pesantren yang penuh dengan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan ketaatan kepada Kiyai. Santri diajarkan untuk hidup mandiri, menghormati guru, dan mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan utamanya adalah mencetak ulama yang faqih (paham

agama) dan zuhud (bersahaja), yang mampu menjadi pemimpin spiritual Masyarakat dan membimbing umat dengan akhlak mulia]. Namun, metode ini seringkali kurang mendorong daya kritis, inovasi, dan pemikiran analitis, yang menjadi kebutuhan di era modern yang menuntut adaptasi dan kreativitas dalam menghadapi berbagai permasalahan baru. Keterbatasan ini juga memicu kritik dari kaum pembaharu yang menginginkan metode pengajaran yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Sampai dengan hari ini, Muhammadiyah adalah organisasi dengan amal usaha di bidang pendidikan yang terbesar di Indonesia. Terutama dibidang pendidikan dasar dan menengah yang jumlah sekolah atau lembaga pendidikannya telah mencapai angka ribuan. Menurut siaran resmi Muhammadiyah, sampai pada tahun 1957 angka lembaga pendidikan Muhammadiyah telah terdapat sebanyak 1.559 buah yang terdiri dari berbagai macam jenis lembaga pendidikan.¹ Dalam perjalanannya angka tersebut terus bertambah dalam jumlah yang besar dan karena itu menarik minat penulis untuk mengangkatnya menjadi topik penelitian ini.

Pendidikan merupakan bidang garapan utama dari awal mulanya organisasi ini berdiri. Pendidikan mendapat perhatian khusus dari Muhammadiyah. karena adanya pemikiran yakni telah gagalnya lembaga-lembaga

¹ Jusuf Abdullah Puar. Pendidikan dan Perguruan Muhammadiyah. dalam “*Almanak Muhammadiyah 1379 H/1959 M*”. PP Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka. Jakarta. 1959. hlm. 73. Lihat juga Mahmud Junus. 1960. *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Djakarta: Pustaka Mahmudiah, hlm. 234-235. Angka tersebut diklaim masih terdapat lebih karena banyak daerah yang belum melengkapi laporan tersebut.

pendidikan Islam yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan kehendak kemajuan zaman. Akibat dari sikap mengisolir diri dari pengaruh luar, serta disebabkan adanya sistem pendidikan konvensional yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman.²

Pendiri dari Muhammadiyah ini adalah Mohammad Darwis yang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan sepulang dari perjalanannya ke tanah suci Mekkah. Sebagai ulama Ahmad Dahlan sangat tekun membaca kitab-kitab, baik kitab kuno yang biasa disebut kitab kuning dan juga kitab-kitab baru. Dengan menekuni kitab-kitab yang bernafaskan pembaharuan dan da'wah itulah nampaknya Ahmad Dahlan tergugah untuk berbuat sesuatu yang dapat menyadarkan umat Islam tentang cita-cita yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pada 1 Desember 1911, Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolahnya yang pertama secara formal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah.³ Sekolah tersebut dikelolanya secara modern dengan mempergunakan metode dan kurikulum baru yang menggabungkan system pesantren dan sistem pendidikan barat, misalnya seperti, menulis latin, ilmu ukur hitung, membaca dan sebagainya

² PP Muhammadiyah. 1963. *Makin Lama Makin Tjinta (Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1962)*. Jakarta: Departemen Penerangan, hlm. 156. Meskipun memiliki peran historis yang penting, pendidikan Islam tradisional menghadapi berbagai keterbatasan pada awal abad 20 yang membuatnya kurang relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang kaku dan kurangnya integrasi dengan ilmu pengetahuan modern membuat lulusannya kurang siap menghadapi tantangan zaman, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.

³ Abdul Munir Mulkhan. 1990. *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 18.

seperti yang diajarkan pada sekolah pemerintah kolonial waktu itu.

Tampaknya Kyai Haji Ahmad Dahlan mempunyai keyakinan bahwa untuk memajukan dan mencerahkan masyarakat Islam di Indonesia yang masih berada dibawah pemerintah kolonial Belanda, jalan yang ditempuh adalah dengan mengambil pelajaran dari ilmu barat. Hal ini juga mengindikasikan perlunya suatu bentuk cara pandang yang baru bagi pendidikan Islam.⁴ Ahmad Dahlan banyak berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya terutama kawannya di Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkannya.⁵ Dari interaksi-interaksi inilah awal gagasan kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan ide-ide KH Ahmad Dahlan tumbuh semakin kuat. Pantulan idenya menjadi embrio dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah sebagai wadah yang kemudian menjadi pengembang tadjid atau pembaharuan yang ia miliki, serta sebagai pelindung bagi keberlangsungan sekolah yang telah didirikannya.

Muhammadiyah dalam melakukan kegiatannya, umumnya dengan cara-cara yang bijaksana tanpa mengundang perlawanan keras. Jalan edukatif dan persuasif lebih merupakan ciri organisasi ini. Kesediaan organisasi ini

⁴ Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 72. Pendidikan kolonial memiliki karakteristik yang sangat terstruktur, dengan jenjang pendidikan yang jelas (HIS, MULO, AMS) dan kurikulum yang berorientasi Barat. Tujuannya Adalah mencetak pegawai rendahan yang loyal kepada pemerintah kolonial, serta menyebarkan budaya Barat untuk menciptakan kelas elit pribumi yang terbaratkan dan terpisah dari akar budaya Barat.

⁵ Haedar Nashir, "Menengok Kembali Kelahiran Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah* No. 22, 16-30 November 2006, hlm. 15.

untuk menerima subsidi dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk pembinaan sekolah-sekolahnya acap kali dipandang secara kritis dan sinis oleh kalangan nasionalis yang netral agama atau bahkan dari kalangan Islam sendiri.⁶ Karena sifat Kyai Ahmad Dahlan yang terlalu berhati-hati dan kadang terkesan terlalu kompromistis tersebut, yang membuat banyak pihak menyebutnya sebagai pragmatis.⁷

Tahun-tahun awal pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Hadji Ahmad Dahlan dapat dikatakan sebagai masa-masa yang lambat tetapi pasti. Upaya untuk memperoleh legalitas sebagai badan hukum telah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak masa awal pendiriannya. Pada zaman penjajahan Belanda, upaya mencari pengakuan badan hukum dilakukan tiga kali.⁸ Upaya pertama dilakukan tahun 1912, menghasilkan ruang gerak seluas karesidenan Yogyakarta. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1920 menghasilkan ruang gerak seluas kawasan Hindia-Belanda seluruhnya, dan upaya yang ketiga pada tahun 1921 menghasilkan pasal-pasal perizinan yang meloloskan ikhtiar berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah di Hindia-Belanda. Dengan ini berarti Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk beroperasi dan melaksanakan aktifitasnya di Nusantara.⁹

⁶ Deliar Noer. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Grafiti, hlm. 13.

⁷ Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 136

⁸ Syaifullah, *Op.cit.* hlm. 80.

⁹ Syaifullah, *Ibid.* hlm. 88.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan semakin berkembangnya organisasi ini maka kebutuhan yang ada pun dirasakan semakin meningkat khususnya dalam hal ini di bidang pendidikan, yaitu kebutuhan akan perguruan tinggi atau suatu Universitas Muhammadiyah. Pada Mukhtar Muhammadiyah yang ke 25 tahun 1935 di Batavia (Jakarta), niat dan cita-cita untuk mendirikan *Aljami'ah* atau Universitas Muhammadiyah sebenarnya sudah diamanahkan dan diputuskan oleh suatu keputusan yang sudah bulat. Perguruan tinggi yang direncanakan merupakan perguruan tinggi teknik dan dagang, yang dijiwai oleh pelajaran agama Islam.¹⁰ Namun upaya untuk mewujudkan cita-cita itu terhambat dengan pecahnya Perang Dunia II. Disusul kemudian dengan masuknya tentara Jepang yang menjatuhkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ditambah lagi dengan suasana mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi fisik. Suasana itu memaksa cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tingginya terhenti untuk sementara.

Permasalahan dan kebutuhan pendidikan tinggi Muhammadiyah yang dipandang cukup mendesak ini bisa dibahas kembali pada “Rapat Kerja Nasional Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah se-Indonesia” tanggal 20-24 Februari 1954 di Bandung.¹¹ Lalu hal tersebut kembali ditegaskan pada tanggal 21-25 Juli 1955 di Pekajangan, Pekalongan dimana digelar Konferensi Pengajaran

¹⁰ Abdul Kahar Mudzakkir. *Da'wah Islamiyah Tugas Setiap Muslim* dalam PP Muhammadiyah 1960-1961. *Almanak Muhammadiyah 1380*. Yogyakarta: Madjlis Taman Pustaka, hlm. 112. Lihat juga Abdul Munir Mulkhani. *Op.cit.* hlm 40.

¹¹ H. Hasan Ahmad. “Sejarah Lahirnya PTM Pertama di Indonesia”. *Suara Muhammadiyah* No.17. 1-15 September 2006, hlm 28

Muhammadiyah dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pengajaran dan utusan-utusan dari perwakilan Muhammadiyah daerah seluruh Indonesia. Dalam konferensi tersebut dibahas masalah-masalah yang sebagian merupakan kelanjutan dari konferensi besar sebelumnya di Bandung pada 1954. Pada saat itu cita-cita pendirian Universitas Muhammadiyah ini mendapat perhatian yang semakin kuat.

Berkat kerja keras panitia pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah dan bantuan dari seluruh pihak yang ada waktu itu maka pada tanggal 18 November 1955, bertepatan pada hari ulang tahun Muhammadiyah ke-43, berlangsunglah upacara peresmian berdirinya Universitas Muhammadiyah yang pertama kali di Indonesia, dengan Presiden Universitas yang pertama dipercayakan kepada dr. H. Ali Akbar. Fakultas pertamanya adalah Fakultas Falsafah dan Hukum yang bertempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, Sumatera Barat.¹²

Tidak lama setelah pembukaan fakultas pertama dari Universitas Muhammadiyah Padang Panjang di Sumatera Barat, terjadi suatu peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI 1957. Maka, cita-cita dan usaha mengenai Universitas Muhammadiyah terancam kembali hilang, hal ini berhubungan pada waktu itu Universitas

¹² “Surat Fakultas Falsafah dan Hukum (Padang Pandjang) Universitas Muhammadiyah kepada PP Muhammadiyah” tanggal 3 april 1957, ANRI, Nomor panggil 926. Lihat juga Hasan Asari tentang “Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia” dalam Abuddin Nata dan Asyumardi Azra (ed). 2001. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, hlm 231.

Muhammadiyah baru hanya memiliki Fakultas Falsafah dan Hukum yang berada di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang sedangkan di daerah tersebut terjadi pergolakan PRRI, maka untuk menyelamatkan cita-cita Universitas Muhammadiyah ini didirikanlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Muhammadiyah, diresmikan pada tanggal 18 Nopember 1957. Panitia peresmian diketuai oleh H. Arso Sosroatmodjo, sedangkan pimpinan dipercayakan kepada Sugarda Purbakawatja. Untuk pertama kali PTPG ini membuka Jurusan Ilmu Mendidik (pendidikan), dengan kurikulum yang berorientasi pada PTPG Negeri. PTPG ini mengambil tempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1958 PTPG Muhammadiyah berubah nama menjadi FKIP, dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah.

Dalam perkembangannya kemudian Universitas Muhammadiyah yang berada di Jakarta ini dikukuhkan pendiriannya, dengan Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo S.H di Jakarta dengan nomor 71 tanggal 19 Juni 1963, menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Lalu FKIP Muhammadiyah Jakarta sebagai fakultas yang tertua dari Universitas Muhammadiyah memisahkan diri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi IKIP Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1965 dengan rektornya yang pertama Bapak A. S. Broto. Pemisahan antara FKIP menjadi IKIP ini ternyata merupakan pola perkembangan FKIP yang terjadi secara nasional dimana FKIP Negeri juga

memisahkan dirinya dari universitas negeri setempat, menjadi IKIP Negeri yang mandiri secara pengelolaan.¹³ Hal yang sama juga terjadi pada FKIP Muhammadiyah di daerah yang tadinya merupakan cabang dari FKIP Jakarta.

Studi tentang Muhammadiyah dapat dikatakan cukup banyak, baik yang membahas dari segi keagamaan, pemikiran, organisasi, bahkan sejarah. Hal ini disebabkan karena keunikan dari corak organisasi ini, yang berangkat sebagai gerakan pembaharu atau purifikasi di bidang agama, namun memiliki dimensi yang berimplikasi kepada bidang kehidupan lain yang amat luas. Khusus mengenai karya sejarah tentang Muhammadiyah memang sudah ada dari beberapa peneliti seperti Alfian tentang *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Karya ini dapat dibilang sangat baik karena memuat data-data yang komprehensif yang penulis sendiri banyak gunakan mengenai pendidikan Muhammadiyah di zaman kolonial, namun karya tersebut memfokuskan pada perilaku politik Muhammadiyah pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Lalu karya lainnya oleh Syaifullah “*Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*” di dalam karya tersebut dibahas keterlibatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam perpolitikan di masa demokrasi parlementer dengan juga membahas sejarah pembentukan Muhammadiyah pada bagian-bagian awal karyanya tersebut.

¹³ Anhar Gonggong (ed). 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm. 63.

Sedangkan dua karya lainnya adalah Weinata Sairin “*Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*”, lalu satu lagi oleh Abdul Munir Mul Khan “*Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*”. Karya yang pertama, membahas mengenai sikap organisasi Muhammadiyah terhadap pemberlakuan kebijakan asas tunggal oleh pemerintahan orde baru, dengan memuat sebagian sejarah organisasi ini pada bagian awalnya. Sedangkan karya yang kedua oleh Abdul M. Mul Khan tidak banyak membahas sejarah Muhammadiyah, ia lebih banyak membahas tentang pemikiran Muhammadiyah terhadap masalah-masalah sosial yang sedang terjadi saat ini.

Dari karya-karya yang disebut diatas dapatlah tergambar luasnya jenis penelitian mengenai Muhammadiyah. Namun penulis tidak menemukan karya tulis umum yang membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan Muhammadiyah terlebih lagi di bidang pendidikan tinggi secara lebih spesifik. Karya-karya lain mengenai Muhammadiyah yang dapat penulis temukan kebanyakan bersifat hanya sebagai suatu pelengkap dari penelitian yang lain atau topik bahasan yang lain atau dengan tema-tema yang berbeda-beda yang tidak begitu relevan dengan topik ini. Seperti topik tentang Muhammadiyah dan pendidikan yang ada kebanyakan merupakan karya dengan latar belakang ilmu pendidikan (pedagogik/tarbiyah), sehingga masalah yang diteliti pun hanya bersifat permasalahan parsial ilmu pendidikan dan pengajaran.

Oleh karena itu, penulis memilih tema sejarah Muhammadiyah dan pendidikannya khususnya tentang perkembangan PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) karena penulis melihat tema ini belum dibahas secara khusus

dan semoga bisa menjadi masukkan yang bermanfaat untuk peminatan pada topik yang serupa. Dengan demikian, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah perkembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka yang ada di Jakarta. Untuk membahas permasalahan secara lebih mendalam, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana perkembangan pemikiran tentang pendidikan dalam Muhammadiyah?. *Kedua*, Bagaimana upaya Muhammadiyah dalam merintis dan mewujudkan gagasannya tentang pendidikan tinggi?, *Ketiga*, Bagaimana penerapan gagasan Muhammadiyah tentang Universitas Muhammadiyah melalui fakultasnya di Jakarta yang bernama FKIP?

B. Tujuan Penulisan Buku

Muhammadiyah hingga hari ini merupakan lembaga swasta dengan jumlah kepemilikan perguruan tinggi yang terbesar di Indonesia dengan 176 Perguruan Tinggi yang dimilikinya. Maka, Penulisan ini bertujuan untuk melihat usaha perintisan Muhammadiyah dan kiprah organisasi ini dibidang pendidikan, khususnya pada bidang pendidikan tinggi. Di samping itu juga, tujuan lainnya adalah untuk memberi sedikit kontribusi bagi penulisan sejarah pendidikan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah. Metode sejarah memiliki empat tahapan.

Tahap pertama yaitu mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian diolah secara sistematis dan teratur. Metode ini diawali dengan mengumpulkan data (heuristik), pada tahap ini sumber-sumber yang dicari adalah baik yang merupakan sumber primer maupun sekunder, juga sumber sejarah lisan melalui metode wawancara.

Pada tahap pertama ini, berhasil dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang dapat penulis temukan ialah berupa Arsip arsip dari organisasi ini yang berisi laporan-laporan hasil rapat, surat menyurat antar pengurus organisasi ataupun laporan pertanggung jawaban dari pengurus Muhammadiyah terkait dengan topik penelitian ini, serta bentuk-bentuk arsip lain yang mendukung. Selain arsip diperoleh juga kumpulan dokumen yang dibukukan dan terbitan resmi dari organisasi Muhammadiyah seperti “Almanak Muhammadiyah” yang sejaman dengan periode penelitian, lalu diperoleh pula publikasi resmi seperti laporan Muktamar dan laporan Muhammadiyah dari cabang yang bersangkutan. Lalu ada sumber yang memuat surat menyurat antara pejabat pemerintah kolonial terkait masalah pendidikan tinggi yang kemudian oleh Depdikbud RI diterjemahkan dan dibukukan, menurut penulis sumber ini dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena merupakan rekaman sejaman.

Sedangkan sumber sekunder yang ditemukan adalah berupa buku-buku dan artikel-artikel. Baik sumber primer maupun sekunder yang berhasil penulis kumpulkan sangat berguna untuk menunjang penulisan ini sebagai sebuah penelitian awal. Pada tahap pengumpulan sumber-sumber Sejarah ini terdapat kendala yang dihadapi penulis.

Kendala yang dihadapi dari pengumpulan sumber-sumber sejarah antar lain adalah terbatasnya waktu dan tidak tersedianya beberapa data yang di butuhkan seperti catatan-catatan resmi mengenai laporan harian dari kegiatan atau aktifitas di kampus, namun beberapa data primer yang penulis rasa sangat mendukung antara lain adalah berupa arsip-arsip serta publikasi resmi seperti Almanak Muhammadiyah, laporan muktamar yang semuanya merupakan rekaman sejamin.

Sumber-sumber yang telah diperoleh dalam tahapan diatas tersebut kemudian akan melalui tahapan yang disebut kritik dimana kelayakan sumber-sumber tersebut akan dilihat lagi secara lebih seksama untuk dipakai sebagai bahan untuk melakukan penulisan. Pada tahap ini penulis berusaha menguji data-data yang berhasil ditemukan baik dari sumber primer maupun sekunder tersebut, antara lain adalah dengan membandingkan data yang sama yang terdapat pada beberapa sumber. Dari proses kritik ini diharapkan dapat dikumpulkan fakta-fakta Sejarah yang akurat sebagai bahan penulisan.

Tahap yang ketiga, adalah interpretasi, yaitu dimana sang penulis berusaha untuk melakukan penafsiran terhadap isi data dalam sumber-sumber yang telah didapatkan tadi. Untuk dilanjutkan ke dalam tahapan berikutnya. Tahap yang terakhir dari metode ini adalah historiografi dimana tahapan ini merupakan finalisasi dari seluruh rangkaian metode ini yaitu adalah pada saat penulisan. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan di seleksi, dikelompokkan, dan kemudian disusun sehingga dapat menggambarkan kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

D. Sumber Sejarah

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk memperkuat kredibilitas terhadap penelitian ini tentunya juga penulis berusaha untuk menyertakan sumber primer sebagai sumber data. Sumber primer tersebut berupa arsip-arsip/dokumen, atau pun terbitan resmi organisasi ini seperti “Almanak Muhammadiyah” edisi tahun 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 juga majalah resmi dari organisasi Muhammadiyah yang bernama *Suara Muhammadiyah* dimana terdapat banyak artikel yang mendukung untuk penulis gunakan dalam rencana penelitian ini, juga buku-buku yang penulis temukan yang merupakan publikasi resmi dari Muhammadiyah, buku tersebut merupakan kumpulan berbagai macam tulisan mulai dari naskah pidato, laporan perkembangan organisasi, karya ilmiah, dan lain-lainya yang dikumpulkan dalam rangka memeriahkan muktamar-muktamar Muhammadiyah. Sumber-sumber tersebut kebanyakan berasal dari koleksi pribadi keluarga (yang kebetulan juga merupakan aktifis dan tokoh Muhammadiyah).

Sumber primer yang ditemukan dalam bentuk arsip organisasi didapat dari koleksi Arsip Nasional RI. Di tempat itu terdapat banyak sekali arsip mengenai Muhammadiyah, karena memang ternyata pada tahun 1995 telah terjalin kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan Arsip Nasional RI (ANRI) dimana PP Muhammadiyah menitipkan atau menyerahkan sebagian besar arsipnya kepada ANRI sehingga bagi para penulis lain yang akan meneliti mengenai Muhammadiyah akan sangat mudah baginya untuk

mendapatkan bahan yang dicarinya karena sudah tersusun rapih didalam katalog yang memuat daftar panggil ribuan surat ataupun dokumen-dokumen lainnya. Di tempat tersebut juga terdapat catatan-catatan mengenai Muhammadiyah di masa kolonial.

Selain primer, sumber lain yang banyak dipakai oleh penulis adalah sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terdapat di berbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Di perpustakaan ini terdapat banyak bahan referensi mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang besar sekali manfaatnya bagi penelitian ini. Beberapa tempat pencarian data yang lain adalah Gedung Dakwah PP Muhammadiyah di jalan Menteng Raya No. 62, dan juga Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berada di Jalan Ciputat Raya. Penulis juga mempergunakan sumber dari Internet tentunya dengan mengecek ulang kebenarannya.

Sumber kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber lisan yang diperoleh datanya melalui wawancara mendalam kepada agensi atau pelaku sejarah yang terlibat atau hidup sejaman dalam dinamika IKIP Muhammadiyah Jakarta dan FKIP Uhamka. Untuk memverifikasi sumber tertulis diperlukan wawancara mendalam terhadap pelaku sejarah seperti Rektor Uhamka, mantan Dekan, pensiunan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengabdikan pada Uhamka, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Timur, serta tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya untuk memperkuat paradigma penelitian ini dan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian.